

# IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ASSET DAERAH ( STUDI KASUS ALIH FUNGSI LAHAN TERMINAL MENJADI PUSAT PEMERINTAHAN DI KOTA PADANG )

Dery Eka Putra

Email : dery.ekaputra@rocketmail.com

Dibimbing oleh Prof. Dr. H. Sujianto, M.Si

Program Studi Administrasi Negara FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

## Abstract

*The purpose of this study is to determine how the asset management area in Padang city after land use terminal into the center of government. Where by looking at the management of many lands that were previously found new purpose terminals such as terminal of Andalas and goan hoat. The result of study found several factors that effect the asset management area in terminal divert land functioned as asset management area is human resources, financial resources and area infrastructure. The most dominal factor in asset management in Padang is financial resources.*

*This research was conducted in Padang. Exactly, financial services and asset management, and DPRD Padang where becoming population and sample in this study was officers or employees of a financial services and asset managemnt and employees of parliament/DPRD Padang, samples using in this study was a sampling technique, data collection is the method of observation, interview and documentation after the data colleted analyzed using qualitative and descriptive analysis.*

*After this research study was found that asset management area in Padang was not good, this thing can be seen the from G.R Terry theory are reviewed based on four indicators ie: planning, organizing, actuating dan controlling.*

**Keywords :** *asset area of Padang, management, planning, organizing, actuating dan controlling.*

## PENDAHULUAN

Kota sangat berperan penting bagi pemerintahan karena pusat dari segala aktifitas pelayanan administrasi pemerintah berpusat di kota sehingga itulah sangat penting nya kota bagi pemerintahan khusus nya pemerintahan kota padang, Pusat Kota pada umumnya merupakan lokasi yang paling strategis tempat berbagai kegiatan fungsional kota terkonsentrasi dengan intensitas tinggi, serta merupakan tempat terkonsentrasinya berbagai fasilitas pemenuhan kebutuhan

penduduk yang berskala pelayanan tinggi.

Demikian juga halnya dengan kondisi Kota Padang, dimana berbagai kegiatan terkonsentrasi di pusat kota dan ini akan berdampak negatif terhadap kemampuan daya dukung lingkungan dalam memenuhi kebutuhan fasilitas kehidupan penduduk baik ekonomi, sosial, maupun budaya. Apalagi dengan kondisi Kota Padang, dimana lokasi pusat pemerintahan berada berdampingan dengan pasar raya, yang mengakibatkan terlalu beratnya beban di pusat kota. Untuk itu perlu

dilakukan penyebaran pusat-pusat kegiatan, agar tidak terkonsentrasi pada satu titik. Di satu sisi, Kota Padang dan sebagian wilayah pantai barat Provinsi Sumatera Barat telah diguncang gempa bumi pada tanggal 30 September 2009. Gempa tersebut telah menghancurkan sebagian prasarana dan sarana serta utilitas kota dan permukiman. Salah satu fasilitas penting yang mengalami kehancuran adalah pusat pemerintahan Kota Padang yang selama ini terkonsentrasi di Balai Kota Lama Jl. M. Yamin. Gedung perkantoran tersebut tidak bisa lagi difungsikan sebagaimana mestinya karena sebagian besar bangunan sudah hancur dan sebagian lagi rusak parah.

Hal ini tentu saja menyebabkan pelayanan publik terganggu. Pemerintah Kota Padang berkewajiban segera membenahi sarana dan prasarana pelayanan publik dimaksud. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa Pemerintah Kota berkewajiban mengelola sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkesinambungan serta bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan/atau penggantian sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik. Artinya, fasilitas pelayanan yang mengalami kerusakan dan mengancam keselamatan manusia tentu saja mesti segera diperbaiki agar pelayanan dapat segera berlangsung dengan nyaman.

Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah secara berdayaguna dan berhasil guna, maka fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian sangat penting untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah maka kota padang mengeluarkan peraturan daerah nomor 10 tahun 2009 tentang pengelolaan barang milik daerah. Di peraturan daerah nomor 10 tahun 2009 menyebutkan bahwa dalam mengelola

barang milik daerah adalah pejabat yang di beri tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan barang daerah yang berada pada SKPD yaitu Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah. Dalam pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan azas :

1. Azas fungsional
2. Azas kepastian hukum
3. Azas transparansi
4. Azas akuntabilitas
5. Azas kepastian nilai

Salah satu kebijakan yang diambil Pemerintah Kota Padang adalah dengan merelokasi pusat pemerintahan seperti yang tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah) Kota Padang 2009-2014. Pemandahan pusat pemerintahan kota padang ini tertuang juga dalam surat keputusan DPRD kota padang nomor 189.06 /DPRD-PDG/2010 yang berbunyi menyetujui pemindahan pusat pemerintahan kota padang dari jalan Prof. M. Yamin, SH nomor 70 padang barat ke aie pacah kecamatan koto tangah. Dengan adanya pengalih fungsian terminal ini maka kota padang menjadi satu-satunya propinsi yang tidak mempunyai terminal angkot ataupun terminal bus. Sebenarnya tidak kali ini saja terminal dialih fungsikan oleh pemko padang ada beberapa terminal yang berada di kota padang juga di alih fungsikan seperti terminal angkot goan hoat, terminal bus lintas andalas dan yang terakhir terminal regional bingkuang.

Relokasi pusat pemerintahan harus diperhitungkan secara matang, baik penyediaan sarana dan prasarana pendukung, fasilitas pelayanan masyarakat, aksesibilitas dan daya dukung lahan dari wilayah yang akan dijadikan lokasi pusat pemerintahan baru. Relokasi pusat pemerintahan tersebut hendaknya tidak akan menuai persoalan baru dan tidak menimbulkan keluhan dari masyarakat setelah dilaksanakan nantinya. Kawasan Aie Pacah Kecamatan Koto Tangah ini selain dijadikan sebagai pusat pemerintahan Kota Padang, juga

diproyeksikan sebagai salah satu pusat kota baru, yang nantinya diharapkan mampu mendorong perkembangan wilayah sekitarnya (RTRW Kota Padang 2010-2030). Untuk dapat melakukan perencanaan yang tepat dan untuk mengantisipasi kendala yang mungkin timbul, maka perlu adanya sarana atau prosedur dan pengelolaan yang mantap.

Rencana tata ruang yang mantap atau standar operasional merupakan sarana pengendali perkembangan fisik di dalam pelaksanaan pembangunan, yang berarti bahwa rencana tersebut sudah diberikan landasan hukum pelaksanaannya berupa Peraturan daerah Sebagai syarat untuk menjamin berfungsinya rencana tata ruang wilayah tersebut maka didalam proses penyiapan, penyusunan dan pelaksanaannya perlu dukungan dan instansi-instansi vertikal atau dinas-dinas Pemerintahan Daerah Kota Padang maupun partisipasi masyarakat didalam penanganannya. sejalan dengan laju pertumbuhan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan pembangunan kota. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas pengelolaan keuangan dan aset Bagian aset bangunan melaksanakan fungsi dengan memberikan Perumusan kebijaksanaan teknis yang di maksud pemberian bimbingan teknis dan pembinaan serta prosedur adalah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota dan seseuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka penulis mengidentifikasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi pengelolaan aset daerah yang dilakukan oleh dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kota Padang

2. Faktor-faktor apa saja yang membuat terjadinya alih fungsi lahan terminal menjadi perkantoran di Kota Padang

## C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk:
  - a. Untuk Mengetahui implementasi pengelolaan aset daerah yang dilakukan oleh Dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah di kota padang.
  - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang membuat terjadinya laih fungsi lahan terminal menjadi perkantoran di Kota Padang
2. Kegunaan Penelitian, Bahan ini diharapkan akan berguna untuk:
  - a. Bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan dalam menelaah prosedur alih fungsi lahan dan bangunan
  - b. Bahan informasi bagi pihak-pihak lain yang ingin melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang sama
  - c. Sumbangan terhadap ilmu pengetahuan khususnya ilmu administrasi.

## KONSEP TEORITIS

### 1. Prosedur

Menurut **Ismail Masya (1999:74)** prosedur merupakan rangkaian tugas yang saling berkaitan yang merupakan urutan waktu dan cara tertentu untuk melakukan pekerjaan yang harus diselesaikan.

Prosedur adalah “Urutan-urutan pelaksanaan yang harus diikuti dan dituruti oleh seorang dalam melakukan suatu tindakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu” (**Manullang, 1999:39**).

Sedangkan menurut **Soedjadi (1990:87)**, mengemukakan bahwa “Prosedur pada pokoknya adalah merupakan rangkaian dari suatu tata kerja yang berturut, tahap demi tahap serta jelas menunjukkan jalan atau arus yang harus

ditempuh dari mana pekerjaan itu berasal, kemana diteruskan dan kapan atau dimana selesainya dalam rangka penyelesaian suatu bidang pekerjaan/ tugas". Didalam suatu proses, setiap prosedur akan terjadi atas urutan kegiatan, dalam tujuan kegiatan ada sejumlah metode dan tata kerja untuk menyelesaikan setiap tahap pekerjaan atau kegiatan (Suganda, 1989:33)

## 2. Konsep manajemen

Dalam bahasa Inggris manajemen berasal dari kata "to manage yang dalam bahasa Indonesia dapat berarti mengurus, mengemudikan, mengelola, menjalankan, membina dan memimpin. Sama halnya dengan administrasi, kata manajemen juga berasal dari bahasa Latin, yaitu dari asal kata *mantis* yang berarti tangan dan *agere* yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabungkan menjadi kata *managere* yang artinya menangani. *Managere* diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja *to manage*, dengan kata benda *management*, dan *manager* untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen akhirnya, *management* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan

**G. R Terry** (2006:4) mendefinisikan manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya.

**Menurut manullang** (2005:3) manajemen mengandung tiga pengertian yaitu pertama; manajemen sebagai proses, kedua ; manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen, dan ketiga; manajemen sebagai salah satu seni dan sebagai suatu ilmu. Menurut pengertian yang pertama, yakni manajemen sebagai proses, berbeda-beda dengan definisi yang diberikan oleh para ahli. Dalam *Encyclopedia Of The Social Science*

dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Selanjutnya haiman mengatakan bahwa manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

Dari ketiga definisi di atas, terlihat ada tiga poin penting dalam definisi tersebut, yaitu adanya tujuan yang ingin dicapai, tujuan dicapai dengan menggunakan kegiatan orang lain dan kegiatan-kegiatan tersebut dibimbing dan diawasi. Manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen dalam suatu seni berfungsi untuk mencapai tujuan yang nyata mendatangkan hasil atau manfaat, sedangkan manajemen sebagai salah satu ilmu berfungsi menerangkan fenomena-fenomena, kejadian-kejadian, dan memberikan penjelasan.

**Menurut iskandar kasim** (2005:5) fungsi utama manajemen adalah untuk mengelola program kerja melalui proses-proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan atau perencanaan ulang, agar tujuan organisasi tersebut dapat tercapai secara efisien. Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan dan pengarahan suatu kelompok orang ke arah tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata **Brantas** (2009:4)

**Ruddi suhardi** (2008:7) mendefinisikan manajemen sebagai proses pembimbingan, pengarahan serta pemberian fasilitas kerja kepada orang-orang yang diorganisir dalam kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Manajemen adalah suatu proses yang mana manajer sebagai pencipta, mengarahkan, memelihara dan melaksanakan tujuan organisasi melalui koordinasi dan kerjasama dari usaha manusia.

Menurut **Hasibuan dalam Marinis** (2008 :3), manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses

pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber \_ sumber lainya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang – orang kearah tujuan yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok dengan tujuan operasional

Tugas utama dari seorang manajemen adalah mencapai tujuan organisasi yang dipimpinnya. Untuk mencapai tujuan organisasi seseorang manajemen harus melakukan beberapa fungsi manajemen.

### **3. Konsep manajemen pemerintahan daerah**

**Raharjo adisasmita** (2011:2) manajemen pemerintahan daerah yang efektif dan efisien dimaksudkan sebagai manajemen yang mampu menyelesaikan tugas pekerjaan pemerintahan daerah secara cepat tidak mengalami pemborosan atau ke borosan waktu maupun dana dan daya, serta menghasilkan pelayanan yang berkualitas dan mendengarkan aspirasi rakyat.

### **4. Konsep Manajemen aset daerah**

**Mahmudi** (2010:145) manajemen aset daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah, yang di beli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainya yang sah. **Mahmudi** juga menyebutkan bahwa aset daerah mempunyai tiga kategori yaitu:

- a) Aset daerah yang di gunakan untuk operasi pemerintahan daerah
- b) Aset daerah yang digunakan masyarakat dalam rangka pelayanan publik
- c) Aset daerah yang tidak digunakan untuk pemerintah maupun publik

**Puji agus dan riyanto** (2012:4) menyebutkan bahwa manajemen aset adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan penyimpanan dan

penyaluran, penilaian, penghapusan dan pemindahtanganan. Manajemen aset itu terdiri dari lima tahapan kerja yang satu sama lainya saling terkait yaitu:

1. Inventarisasi aset
2. Legal audit
3. Penilaian aset
4. Optimalisasi aset, dan
5. Pengembangan sistem informasi manajemen aset (SIMA), dalam pengawasan dan pengendalian aset

### **5. Konsep Manajemen perencanaan pembangunan**

**Riant nugroho** (2011:2)

manajemen perencanaan pembangunan adalah merupakan upaya manusia meminimalkan ketidakpastian dalam rangka perencanaan pembangunan, sepanjang perencana tidak dapat menjamin adanya kepastian, makan sepanjang itulah pembangunan yang ideal sulit diperoleh atau ditemukan.

## **METODE PENELITIAN**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, dengan pendekatan penelitian kualitatif yaitu menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek, baik seseorang, lembaga, masyarakat dan lain sebagainya, serta didasarkan atas hasil observasi yang dilakukan serta memberikan argumentasi terhadap apa yang ditemukan dilapangan dan dihubungkan dengan konsep teori yang relevan dan menggambarkan dengan jelas bagaimana implementasi aset daerah dan alih fungsi lahan terminal menjadi perkantoran di kota padang.

#### **a. Lokasi penelitian**

- a) Adapun yang dijadikan lokasi penelitian adalah kota Padang yaitu Dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah (DPKA) kota padang
- b) DPRD kota Padang

#### **b. Informan penelitian**

Informan adalah orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau

orang yang memberikan keterangan pada peneliti

- a) Yang dijadikan informasi dalam penelitian ini adalah:
  1. Kepala Dinas atau Pegawai Dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah (DPKA) kota padang
  2. Staf DPRD Kota Padang

**c. Jenis dan sumber Data**

1. Data primer

Adalah data dan informasi yang di kumpulkan dan diolah sendiri oleh penulis yang bersumber dari obyek penelitian yaitu para responden, seperti hasil wawancara .

Faktor internal, yaitu faktor yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan dalam organisasi. Di kantor dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah kota padang

Faktor eksternal, yaitu faktor mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi meliputi semua kekuatan yang timbul diluar batas organisasi kantor dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah kota padang

2. Data sekunder

Adalah data yang diperoleh dari dokumen Dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah kota padang, seperti jumlah pegawai, struktur organisasi kantor, prosedur alih fungsi lahan dan data lain yang mendukung penelitian ini.

**d. Teknik Pengumpulan Data**

1. Wawancara, yaitu memberikan pertanyaan kepada pimpinan dan pejabat fungsional dan kepada pihak-pihak yang di anggap perlu, yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.
2. Observasi, penulis menganalisa dari dekat gejala-gejala yang terdapat dalam penelitian untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan apa yang diteliti.

3. Dokumentasi, adalah studi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan menghimpun, dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis juga gambar

**e. Analisa data**

Setelah informasi dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul maka informasi tersebut akan dianalisis dengan teknik analisa kualitatif dengan menjelaskan secara deskriptif mengenai implementasi pengelolaan aset daerah study kasus alih fungsi lahan terminal menjadi pusat pemerintahan di Kota Padang serta menggambarkan secara utuh fenomena yang terjadi

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian yang penulis lakukan, baik melalui wawancara maupun angket /yang dibagikan kepada responden ditujukan untuk mencari informasi mengenai pengelolaan aset daerah kususnya alih fungsi lahan terminal di Kota Padang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu teknik menganalisa data dengan menggambarkan secara utuh kenyataan mengenai permasalahan yang diteliti. Setelah data didapat kemudian di analisa secara deskriptif, kemudian untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset daerah yaitu alih fungsi terminal di Kota Padang dianalisis berdasarkan hasil penelitian.

Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pengelolaan Aset Daerah dan pegawai Dinas Pengelolaan Aset Daerah yang ditunjuk melaksanakan pengelolaan terhadap aset daerah kusunya alih fungsi lahan terminal. Kemudian dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan diperoleh data tentang pengelolaan aset daerah di Kota Padang, selanjutnya akan dideskripsikan satu persatu sebagai berikut :

### III.1. Pengelolaan aset daerah studi kasus alih fungsi lahan terminal menjadi pusat pemerintahan di Kota Padang

Pengelolaan adalah suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu atau serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. Pengelolaan aset daerah dalam alih fungsi lahan terminal di Kota Padang dapat dilihat dari sejauh mana tujuan pengelolaan aset daerah dapat dilaksanakan. Hasil penelitian yang dilakukan terhadap pengelolaan aset daerah studi kasus alih fungsi lahan terminal di Kota Padang dapat dilihat dari *Planning, Organizing, Actuating dan Controlling* pada penjabaran berikut ini :

#### 1. *Planning* (Perencanaan)

Untuk kelancaran dalam pengelolaan aset daerah ditentukan dengan adanya perencanaan yang baik dan pengelolaan yang harus dilakukan harus berdasarkan perencanaan yang telah dibuat. Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuta serta menggunakan asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan melalui penetapan tujuan dan cara pencapaiannya serta penentuan alokasi sumber daya, indikator perencanaan dalam penelitian ini bermaksud untuk mengetahui apakah perencanaan dalam pengelolaan aset daerah kasus alih fungsi lahan terminal di Kota Padang telah dilakukan dengan baik mengenai perencanaan yang dilakukan dapat dilihat dari tanggapan informan mengenai :

- a. Adanya penyusunan rencana kerja dan anggaran yang jelas dalam pengelolaan aset daerah studi kasus alih fungsi lahan terminal di Kota Padang
- b. Adanya penetapan sasaran dan tujuan alih fungsi lahan terminal
- c. Adanya penentuan solusi terhadap permasalahan

Untuk melihat bagaimana *planning* (Perencanaan) dalam pengelolaan alih fungsi lahan terminal di Kota Padang, maka dilakukan observasi dan wawancara terhadap informan penelitian dan ditemukan data bahwa perencanaan yang dilakukan dalam pengelolaan alih fungsi lahan terminal belum dipersiapkan dengan baik, dari informan yang dimintai keterangan, mereka menanggapi perencanaan yang dilakukan dalam pengelolaan alih fungsi lahan terminal di Kota Padang belum dilakukan dengan matang, meskipun perencanaan beberapa perencanaan pada bagian – bagian tertentu telah dilakukan dengan baik, namun masih banyak perencanaan yang belum di jelaskan secara detail sehingga saat pengelolaan alih fungsi lahan terminal terjadi ketidak sesuaian dengan tujuan yang ingin dicapai antara lain, terminal beralih fungsi jadi plaza, terminal beralih fungsi menjadi sentral pasar raya dan yang terbaru sekarang terminal di alih fungsi kan menjadi pusat pemerintahan sehingga membuat Kota Padang menjadi Kota di Indonesia yang tidak mempunyai terminal.

Perencanaan yang kurang baik terhadap pengelolaan alih fungsi lahan terminal di kota padang juga menyebabkan PO setempat malas memasukan armada bus nya ke terminal sehingga adanya terminal bayangan di beberapa titik Kota Padang menyebabkan kemacetan yang luar biasa pada saat jam pulang kantor atau libur.

Penyusunan rencana kerja dan penganggaran dalam pengelolaan alih fungsi lahan terminal di Kota Padang belum

dilakukan dengan baik sehingga banyak kendala – kendala yang terjadi seperti keterlambatan batas waktu relokasi, melakukan relokasi di tempat yang kurang tepat dan anggaran APBD Kota Padang terbuang cuma – cuma.

Untuk penetapan sasaran dan tujuan dari alih fungsi lahan terminal telah dilakukan dengan baik yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat dan mengurangi beban berat di pusat Kota. Sedangkan untuk penentuan solusi dari permasalahan yang di hadapi dilapangan belum dapat di selesaikan dengan baik, seperti masih banyak nya bangunan yang belum selesai dibangun pasca alih fungsi lahan terminal ini.

Dari hasil wawancara dengan kepala dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah diketahui bahwa perencanaan untuk pengelolaan aset daerah pasca alih fungsi lahan terminal sudah dilakukan, namun perencanaan yang telah dibuat tersebut belum dirinci dengan baik karena tidak memperhitungkan kondisi dilapangan dan hanya melihat manfaat yang akan diberikan pasca alih fungsi lahan terminal menjadi perkantoran tersebut sehingga banyak terjadi ketidak sesuaian dengan tujuan yang telah ditetapkan, hal ini dapat dilihat dari kutipan wawancara berikut ini :

*“perencanaan dalam pengelolaan aset daerah dalam alih fungsi lahan terminal ini sudah ada dibuat, namun tidak dirinci dengan baik sehingga banyak kondisi dilapangan yang berbeda dengan perencanaan yang sudah ada, contoh nya saja dalam alih fungsi lahan terminal menjadi pusat pemerintahan sekarang, masih banyak SKPD yang belum pindah ketempat perkantoran baru tersebut karena belum siap nya pembangunan pusat pemerintahan tersebut”*

*wawancara dengan kepala DPKA Padang, 30 april 2014 )*

Dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa perencanaan yang dibuat belum maksimal sehingga pada saat pelaksanaannya banyak terdapat kendala – kendala yang membuat alih fungsi lahan terminal ini molor dari target yang ditetapkan.

## **2. Organizing (pengorganisasian)**

*Organize* berarti mengatur, sehingga pengorganisasian merupakan pengaturan dalam pembagian kerja, tugas, hak dan kewajiban semua orang yang masuk dalam suatu kekuatan atau kelompok organisasi. Yang menjadi indikator untuk pengukuran *organizing* ( pengorganisasian ) adalah :

- a. Adanya perincian kerja yang jelas
- b. Adanya penempatan dan pembagian tugas
- c. Adanya pembagian kewajiban

Untuk melihat bagaimana *organizing* ( Pengorganisasian ) dalam pengelolaan aset daerah pasca alih fungsi lahan terminal, maka diajukan beberapa pertanyaan kepada masing – masing informan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengorganisasian dalam pengelolaan aset daerah sudah dilakukan cukup baik. Dalam pengorganisasian pengelolaan aset daerah di KotaPadang sudah dilakukan penempatan dan pembagian tugas pegawai yang akan mengelola aset daerah pasca alih fungsi lahan terminal di Kota Padang, sehingga masing – masing petugas mengetahui peran dan fungsi masing – masing sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas masing – masing, namun pembagian kewajiban yang harus dilakukan oleh masing – masing pegawai belum dirinci dengan

jelas sehingga pegawai kurang bertanggung jawab dengan pekerjaannya, hal ini membuat pengorganisasian dalam pengelolaan aset daerah di Kota Padang menjadi kurang baik, tidak adanya perincian pekerjaan yang jelas membuat petugas kesulitan dalam melaksanakan tugasnya.

Sebagian informan menanggapi bahwa pengorganisasian dalam pengelolaan aset daerah sudah baik, mereka menilai bahwa dalam alih fungsi lahan terminal sudah sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan yaitu membangun sektor perkotaan ke wilayah pinggiran, begitu juga dengan pembagian tugas dan tanggung jawab masing – masing petugas sudah dijelaskan dengan baik dan sudah dilakukan pembagian kewajiban dalam pengelolaan alih fungsi lahan terminal di Kota Padang, mengenai perincian kerja, sebagian responden menanggapi bahwa perincian kerja yang di buat sudah baik.

Kurang baiknya pengorganisasian dalam pengelolaan alih fungsi lahan terminal di Kota Padang disebabkan juga oleh masing kurangnya tenaga yang sesuai bidangnya sehingga tugas yang diberikan tidak dapat dilaksanakan dengan baik, seperti pemilihan tempat alih fungsi lahan terminal yang menjadi pusat pemerintahan sekarang sebenarnya kawasan ini adalah rawa sehingga kalau pusat pemerintahan di pindahkan ke kawasan ini maka akan terjadi pemindahan besar – besaran ke kawasan ini, pemindahan besar – besaran tersebut dapat menyebabkan kawasan ini menjadi langganan banjir.

### **3. *Actuating* (Penggerakan )**

Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar berkehendak dan berusaha dengan keras. Untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dari pihak pimpinan atau dapat juga diartikan sebagai usaha untuk mengarahkan anggota organisasi untuk

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Yang menjadi indikator untuk pengukuran *actuating* ( Penggerakan ) adalah :

- a. Adanya rapat koordinasi antara pengelola aset daerah dengan Dinas Pekerjaan umum dan penanam modal
- b. Adanya perintah – perintah
- c. Adanya penjelasan mengenai aturan – aturan

Untuk melihat bagaimana *actuating* ( Penggerakan ) dalam pengelolaan alih fungsi lahan terminal di Kota Padang, maka di ajukan pertanyaan kepada masing – masing informan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, dari hasil penelitaian dapat dilihat bahwa penggerakan yang dilakukan dalam pengelolaan alih fungsi lahan terminal di Kota Padang cukup baik, hal ini berdasarkan tanggapan dari informan penelitian. Penggerakan yang dinilai cukup baik disebabkan karena kurangnya rapat koordinasi yang dilakukan oleh pihak – pihak terkait dalam mengelola alih fungsi lahan terminal di Kota Padang sehingga banyak informasi yang seharusnya di dapat oleh satu pihak namun karena kurangnya koordinasi yang dilakukan membuat pihak tersebut tidak mengetahuinya, koordinasi yang dilakukan adalah dalam hal pembangunan yang akan dilakukan pada lahan yang dialih fungsikan tersebut seperti pembangunan pusat pemerintahan yang molor dibangun dan pengoperasian nya terlambat sehingga dapat mengganggu pelayanan publik.

Selain itu penggerakan yang dilakukan dalam pengelolaan alih fungsi lahan sudah baik, hal ini menunjukkan bahwa sebagian dari pegawai melakukan koordinasi dengan pihak – pihak terkait, namun koordinasi yang dilakukan tidak

secara rutin sehingga perintah – perintah atau petunjuk – petunjuk dari atasan banyak terjadi kendala dalam pelaksanaannya.

#### 4. *Controlling* (Pengendalian)

Pengendalian merupakan budaya kontrol, pengawasan, evaluasi dan monitoring terhadap SDM, organisasi hasil kegiatan dari bagian – bagian ataupun dari seluruh kegiatan yang ada, untuk memastikan kegiatan dan kinerja organisasi sesuai dengan yang diharapkan. Pengawasan merupakan tahap proses manajerial mengenai pemeliharaan kegiatan serta untuk mengetahui apakah jalannya kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan yang menjadi indikator untuk pengukuran *controlling* (Pengendalian) adalah

- a. Adanya pengawasan dalam operasional alih fungsi lahan
- b. Adanya pengawasan terhadap pemeliharaan aset daerah yang di alih fungsikan serta sarana dan prasarana
- c. Adanya laporan tertulis

Untuk melihat bagaimana *controlling* (Pengendalian) dalam pengelolaan aset daerah yang di alih fungsikan di Kota Padang, maka di ajukan pertanyaan kepada masing – masing informan berdasarkan indikator yang telah di tetapkan, dari hasil penelitian ditemukan bahwa pengendalian yang dilakukan dalam pengelolaan aset daerah di Kota Padang kurang baik, hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh atasan atau yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aset daerah dalam alih fungsi lahan

terminal di Kota Padang, hal ini menyebabkan sering terjadi penyimpangan – penyimpangan yang dilakukan oleh pihak manajemen seperti terjadinya keterlamabatan pembayaran gaji kepada tukang yang akan membangun dikawasan alih fungsi lahan tersebut sehingga pembangunan molor dari waktu yang di tetapkan, oleh karena kurangnya pengawasan, maka terjadi kesimpangsiuran informasi yang menyebabkan terjadinya kesalahan – kesalahan tersebut.

Untuk pengawasan yang dilakukan terhadap operasional pembangunan pusat pemerintahan yang sebelum nya adalah terminal sekarang menjadi pusat pemerintahan belum dilakukan dengan baik. Seperti masih belum siap nya ruangan di pusat pemerintahan yang baru sehingga masih banyak SKPD yang belum bisa bekerja di pusat pemerintahan baru tersebut padahal di akhir tahun 2013 pemerintah padang menargetkan bahwa semua SKPD akan bertempat di pusat pemerintahan yang baru tapi kenyataan berbanding terbalik sampai saat sekarang ini, kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh atasan meyebabkan perencanaan yang telah dibuat tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Hasil dari keseluruhan tanggapan informan mengenai pengelolaan aset daerah khusus alih fungsi lahan terminal di Kota Padang yang dilihat dari indikator *planning, organizing, actuating dan controlling* berada pada kategori kurang baik, karena dapat dilihat bahwa dari keseluruhan jawaban informan dalam penelitian ini pengelolaan aset daerah khusus nya alaih fungsi lahan terminal di Kota Padang dikatakan tidak baik disebabkan oleh kurangnya perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, beberapa perencanaan telah dilakukan dengan baik, namun masih banyak perencanaan yang belum dijelaskan secara detail sehingga pengelolaan tidak berjalan dengan baik

dan belum sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai antara lain, pembangunan yang belum selesai, SKPD masih belum bisa menempati bangunan tersebut. Sehingga masih banyak SKPD yang menempati gedung yang tidak layak huni seperti seperti DPKA ini sendiri

Pengorganisasian dalam pengelolaan aset daerah di Kota Padang berupa menempatan dan pembagian tugas pegawai yang akan mengelola aset daerah sudah dilakukan dengan baik sehingga masing – masing petugas mengetahui peran dan fungsi masing – masing agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas, namun pembagian kewajiban yang harus dilakukan oleh masing – masing pegawai belum dirinci dengan jelas sehingga pegawai kurang merasa bertanggung jawab dengan pekerjaannya, seperti masih banyak pegawai yang berkeliaran pada saat jam kantor, ini menyebabkan rasa tanggung jawab dalam bekerja itu berkurang sehingga pegawai pemda Padang banyak yang makan gaji buta

Peggerakan yang dinilai cukup baik disebabkan karena kurangnya rapatkordinasi yang dilakukan oleh pihak – pihak terkait dalam pengelolaan aset daerah di Kota Padang sehingga banyak informasi yang seharusnya didapat oleh satu pihak namun karena kurangnya kordinasi yang dilakukan membuat pihak tersebut tidak mengetahuinya, kordinasi yang dilakukan adalah mengenai kesiapan operasional pusat pemerintahan baru yang dulunya adalah terminal, sarana dan prasaran yang kurang serta jumlah sumber daya yang ada. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh atasan atau yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aset daerah terhadap operasional aset daerah di Kota Padang, hal ini menyebabkan sering terjadi penyimpangan – penyimpangan yang dilakukan oleh pihak manajemen seperti terlambatnya pembangunan, oleh karena kurangnya pengawasan, maka terjadi

kesimpangsiuran informasi yang menyebabkan terjadi kesalahan – kesalahan tersebut.

Pengawasan didalam pengelolaan aset daerah dinilai kurang baik, hal ini disebabkan karena masih kurangnya pengawasan yang dilakukan terhadap operasional aset daerah begitu juga dengan pengawasan terhadap sarana dan prasarana berupa masih belum siapnya pembangunan ruangan untuk SKPD yang ada, namun sampai sekarang belum dilakukan perbaikan sehingga terlihat jelas sarana dan prasarana aset daerah tidak dikelola dengan baik. Laporan tertulis dari bawahan kepada atasan belum ada dilaksanakan, hal ini menunjukkan dalam pengelolaan aset daerah di Kota Padang kurang dilakukan *Controlling*, sehingga operasional aset daerah dalam alih fungsi lahan terminal menjadi pusat pemerintahan kurang berjalan sesuai dengan yang di harapkan, kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh atasan menyebabkan perencanaan yang telah dibuat tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

### **III.2. Faktor – Faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset daerah dalam alih fungsi lahan terminal di Kota Padang**

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai evaluasi pengelolaan aset daerah studi kasus alih fungsi lahan terminal di Kota Padang dan juga didukung dengan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset daerah ditemukan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset daerah dalam alih fungsi lahan terminal di Kota Padang :

#### **1. Sumberdaya manusia**

Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia merupakan faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset daerah di Kota Padang, kurang berkualitasknya

sumberdaya manusia membuat pengelolaan aset daerah di Kota Padang tidak berjalan dengan baik. Dalam melakukan pengelolaan dibutuhkan sumberdaya yang sesuai dan memiliki kemampuan dibidangnya sehingga setiap pekerjaan dapat selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dalam pengelolaan aset daerah di Kota Padang masih terdapat kekurangan sumberdaya manusia baik secara berkualitas maupun kuantitas, hal ini menyebabkan banyak pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya, seperti masih banyak bangunan yang belum selesai sehingga SKPD yang ada belum bisa menempati bangunan yang ada, hal ini berdasarkan wawancara dengan kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah mengenai faktor sumberdaya manusia :

*“ Boleh dibilang kalo sumberdaya manusia masih kurang, kita masih kekurangan orang – orang yang ahli dan berpengalaman untuk mengelola aset daerah ini” (hasil wawancara dengan kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, Bapak Syahrul, 5 Mei 2014)*

Dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa faktor sumberdaya manusia merupakan faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset daerah di Kota Padang, sumberdaya manusia yang ada masih kurang terutama orang – orang yang ahli dibidangnya, hal ini menyebabkan pengelolaan aset daerah di Kota Padang kurang berjalan dengan baik. Selain itu kurangnya jumlah petugas yang mengontrol sarana dan prasarana tersebut menjadi tidak terawat.

## 2. Sumberdaya finansial

Kurangnya sumberdaya finansial menyebabkan pengelolaan aset daerah di Kota Padang menjadi terganggu, dalam perencanaannya di akhir tahun 2013 pusat

pemerintahan yang baru sudah bisa dioperasikan tapi kenyataannya sampai sekarang masih belum bisa dioperasikan karena masih banyak infrastruktur yang belum dibangun seperti ruangan SKPD yang ada dan mushola belum selesai.

Dalam pengelolaan aset daerah di Kota Padang, sumberdaya finansial merupakan faktor yang sangat penting, karena kurangnya dana / anggaran untuk melaksanakan pengelolaan aset daerah di Kota Padang menjadi kendala untuk mencapai tujuan yang telah ada, seperti perencanaan pembangunan ruangan SKPD dan Mushola dan yang lainnya, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset daerah mengenai sumberdaya finansial :

*“rencananya pada akhir tahun 2013 pusat pemerintahan yang baru sudah bisa dioperasikan secara maksimal, karena kekurangan anggaran maka hanya beberapa SKPD yang bisa sekarang menempati gedung tersebut” ( hasil wawancara dengan kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, Bapak Syahrul, 5 Mei 2014 )*

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa sumberdaya finansial menjadi faktor dalam pengelolaan Aset daerah di Kota Padang, kurangnya dana yang akan digunakan untuk pembangunan ruangan SKPD yang lain sesuai dengan rencana awal yaitu akhir 2013 semua SKPD Kota Padang sudah bertempat di pusat pemerintahan yang baru menjadi terkendala sehingga pembangunannya menjadi terhenti, meskipun beberapa SKPD sudah menempati pusat pemerintahan yang baru tersebut.

## 3. Infarastruktur

Infrastruktur jalan di Kota Padang masih belum memadai untuk menuju pusat pemerintahan yang baru karena jalan di Kota Padang yang sempit dan padat apalagi jarak dari pusat Kota Padang

dengan pusat pemerintahan yang sekarang sangat jauh sehingga ini dapat menghambat masyarakat untuk mendapatkan pelayanan public yang optimal, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengenai infrastruktur :

*“ kalau dilihat memang kondisi jalan yang sekarang kurang memadai untuk menuju pusat pemerintahan yang baru, seharusnya jalan di perlebar sehingga tidak terjadi kemacetan, karena pusat pemerintahan yang baru terletak di pinggiran Kota otomatis pembangunan – pembangunan yang lain pindah ke pinggiran, ini kalau tidak diantisipasi maka akan terjadi macet besar – besaran ” ( hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bapak Syahrul, 5 Mei 2014 )*

Dari hasil wawancara diatas dapat kita lihat bahwa kondisi jalan yang ada di Kota Padang untuk pusat pemerintahan yang baru belum memadai karena jalan yang sempit dan bus – bus besar juga lewat disana sehingga bisa menimbulkan kemacetan, kalau sudah macet pelayanan public tidak bisa berjalan dengan maksimal.

### **III.3. Faktor dominan yang mempengaruhi pengelolaan aset daerah ( studi kasus alih fungsi lahan terminal menjadi pusat pemerintahan di Kota padang )**

Sebagaimana yang telah penulis uraikan diatas bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset daerah ( studi kasus alih fungsi lahan terminal menjadi pusat pemerintahan di Kota Padang ) berdasarkan hasil wawancara terdiri dari beberapa faktor yaitu faktor sumberdaya manusia, finansial dan infrastruktur, dari hasil wawancara

penelitian diketahui bahwa faktor yang paling dominan adalah faktor finansial

*“ yang paling dominan adalah faktor finansial lah, disini petugas bekerja sesuai dengan anggaran yang ada kalau anggaran kurang maka pengelolaan atau pembangunan aset daerah menjadi terganggu” ( wawancara dengan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, syahrul 5 Mei 2014 )*

Kurangnya anggaran, baik secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap Pengelolaan aset daerah di Kota Padang, karena anggaran adalah kunci utama dari pengelolaan dan pembangunan aset daerah. Kalau anggaran sudah lancar maka sumberdaya manusia akan terpenuhi itu disebabkan ada nya rasa tanggung jawab dari pegawai atau petugas yang di tunjuk untuk mengelola aset daerah tersebut sehingga pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai pengelolaan aset daerah studi kasus alih fungsi lahan terminal menjadi pusat pemerintahan di Kota Padang, adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan aset daerah dalam alih fungsi lahan terminal menjadi pusat pemerintahan di Kota Padang masuk dalam kategori kurang baik, karena masih banyak tujuan – tujuan yang telah ditetapkan didalam perencanaan belum tercapai, seperti fasilitas mushola dan ruangan SKPD yang belum siap sepenuhnya sampai dengan saat sekarang ini memperlihatkan bahwa pengelolaan terhadap aset daerah di Kota Padang masih kurang baik.
2. Dari hasil penelitian juga ditemukan faktor – faktor yang mempengaruhi

pengelolaan aset daerah di Kota Padang yaitu :

- a. Sumberdaya manusia  
Sumberdaya manusia yang kurang berkualitas mempengaruhi pengelolaan aset daerah di kota Padang, kurangnya pengetahuan karyawan terhadap pengelolaan aset daerah di Kota Padang ini membuat operasional pembangunan pusat pemerintahan tidak berjalan sesuai dengan tujuannya. Seperti masih banyak nya pegawai atau karyawan DPKA yang tamatan SMA sehingga tenaga ahli yang berkualitas dalam mengelola aset daerah masih sedikit.
- b. Sumberdaya finansial  
Kurangnya sumberdaya finansial menyebabkan pengelolaan aset daerah menjadi terganggu, dalam perencanaan yang telah dibuat bahwa semua SKPD terkait akan pindah ke pusat pemerintahan yang baru namun kenyataannya hanya beberapa SKPD yang pindah ini disebabkan karena hanya beberapa ruangan yang baru siap digunakan makanya hanya beberapa SKPD saja yang bisa menempati gedung tersebut, hal ini disebabkan kurangnya sumberdaya finansial sehingga pembangunan menjadi terhambat sampai sekarang.
- c. Infrastruktur  
Infrastruktur jalan yang dimiliki belum sesuai untuk menuju lokasi pusat pemerintahan yang baru karena jalannya sempit dan akses perjalanan yang sangat jauh dari pusat kota, hal ini bisa menimbulkan kemacetan yang panjang sehingga dalam pengelolaan aset daerah dan pelayanan public di Kota Padang dapat terganggu

## SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai evaluasi pengelolaan aset daerah studi kasus alih fungsi lahan terminal menjadi pusat pemerintahan di Kota Padang, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset yang dalam hal ini pengelola aset daerah di Kota Padang untuk dapat melakukan perbaikan dalam mengelola aset daerah kedepannya, sehingga aset daerah yang ada dapat dibangun sesuai pada waktu dan tempatnya dan memperlancar pelayanan public yang ada.
2. Untuk melaksanakan pengelolaan aset daerah di Kota Padang dengan baik diharapkan kepada pemerintah untuk melakukan perencanaan secara matang, baik dari infrastruktur maupun finansial sehingga kebijakan yang diambil tidak menuai persoalan baru.
3. Melakukan kordinasi dengan pihak – pihak yang terkait untuk mendukung dalam pengelolaan aset daerah sehingga apabila terdapat kesalahan maupun kekeliruan dalam pengelolaan aset daerah di Kota Padang dapat langsung di evaluasi dan ditangani.

## DAFTAR RUJUKAN

### A. Buku

- Griffin, Ricky W. 2002. *Managemen*, Houghton Mifflin Conpani, Boston,
- Gitosudarmo, Indriyo.2003. *Prinsip Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Bpfe.
- George Dan Rue, Leslie W. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Pt.Bumi Aksara

Haiman. 2008. *Lokakarya Fungsi Manajemen Basic*. Erlangga. Jakarta

Kasim, Iskandar. 2005. *Manajemen Pelayanan Umum Indonesia*. Bumi Aksara. Bandung

Manulang . 2005. *Dasar- Dasar Manajemen*. Ghalia Indonesia. Jakarta

Adisasmita raharjo .2011. *manajemen pemerintahan daerah*. Graha ilmu. Yogyakarta

Suhardi, Rudi. 2008. *Sistem Manajemen ISO*. Balai Pustaka. Jakarta

Mahmudi. 2010. *Manajemen keuangan daerah*. Erlangga. Jakarta

Agus puji. 2012. *Manajemen barang milik daerah*. Dbuku. Surabaya

Nugroho riant. 2011. *Manajemen perencanaan pembangunan*. Alex media komputindo. Jakarta

Salim abas. 1995. *Manajemen transportasi*. Rajawali pers. Jakarta

Adsasmita raharjo. 2011. *Manajemen transportasi darat*. Graha ilmu. Yogyakarta

Hasibuan, Malayu S.P, 2001, *manajemen sumber daya manusia*, Jakarta: Bumi Aksara

Marinis.2008. *pengantar manajemen*.unri press, pekanbar

## B. Karya Ilmiah

Griffin, Ricky W, Ika Elpasra. 2013. *Pengelolaan pasar rakyat di kecamatan benai*.

## C. Dokumen Lainnya

Badan Pendamping Rehabilitasi Dan Rekonstruksi (Bpr) Kota Padang, 2012

Kajian Pengembangan Pusat Pemerintahan Baru Kota Padang.

Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah No. 534/Kpts/M/2001

Perda No. 09 Tahun 2009 Tentang Pembangunan Jangka Menengah Derah Kota Padang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Tahun 2009-2014.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang 2010-2030.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2009 tentang pengelolaan aset daerah [www.padang.go.id](http://www.padang.go.id) tentang dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah